

MEKANISME PERENCANAAN HIBAH

**Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Jakarta, 21 November 2013**



Dasar hukum

- PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 4/2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

Jenis hibah (PP 10/2011, Pasal 48)

Direncanakan

- Mendampingi pinjaman
- Masuk ke dalam dokumen perencanaan
- Memerlukan dana pendamping
- Dilaksanakan oleh LSM melalui pemerintah

Langsung

- Penanggulangan bencana alam
- Kerjasama teknik antara K/L pemberi hibah luar negeri
- Atas permintaan donor diserahkan langsung ke K/L

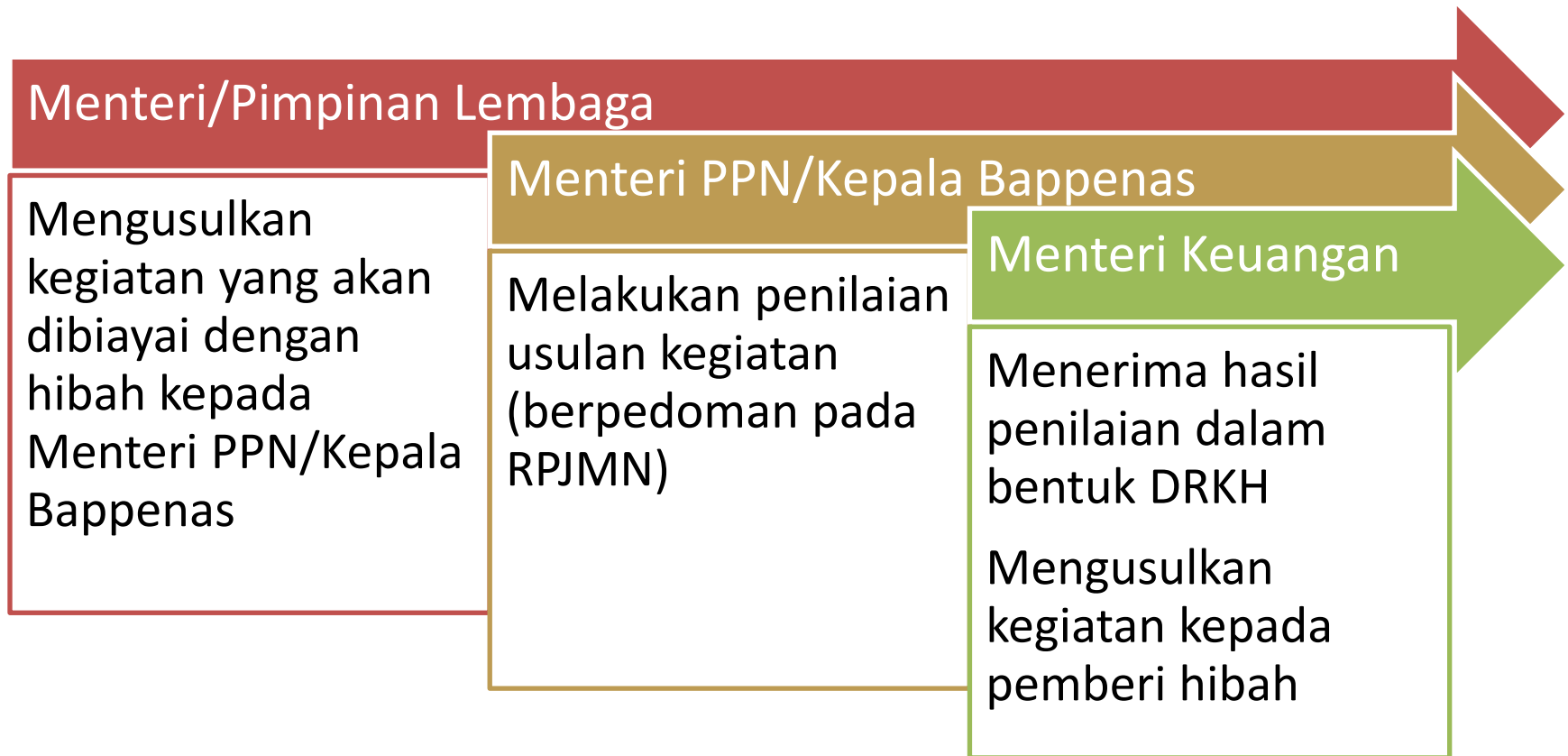
Rencana pemanfaatan hibah (RPH)

- Arah kebijakan
- Strategi
- Pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional

Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)

- Rencana tahunan kegiatan K/L, pemda dan BUMN yang layak dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pembiayaan dari pemberi hibah.
- Bahan dalam penyusunan RKP.

Mekanisme (PP 10/2011, Pasal 54)



On/off budget and treasury

(PP 10/2011, Pasal 42-46)

Seluruh bentuk
hibah

- Dilaksanakan sebagai bagian dari APBN

Uang tunai

- Disetor ke rekening kas umum negara
- Bagian dari APBN

Uang untuk
kegiatan

- Dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran

Barang/jasa dan
surat berharga

- Dinilai dalam mata uang rupiah
- Saat serah terima dicatat dalam Laporan Keuangan PP

Pengusulan kegiatan

(Per MenPPN/KaBappenas, Pasal 47-50)

Daftar isian pengusulan kegiatan hibah:

- Ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari hibah

Dokumen usulan kegiatan hibah:

- Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumberdaya yang dibutuhkan, hasil yang diharapkan, termasuk rencana pelaksanaan
- Untuk mendapatkan gambaran kelayakan
- Lampiran: surat usulan pemda calon penerima penerusan hibah

Ringkasan langkah

Penyusunan rencana pelaksanaan

- Struktur *steering committee*
- Daftar kegiatan dengan tujuan yang sama di berbagai K/L, pemda, LSM)
- Administrator (UNEP untuk GEF)

Pengajuan oleh executing agency

Penilaian oleh Kementerian PPN/Bappenas

- Pencantuman dalam DRKH
- Bila belum tercantum namun telah memenuhi persyaratan dapat dicantumkan dalam DRKH tahun berikutnya

Penandatanganan oleh Menteri Keuangan.

Integrasi ke dalam RKP

DRKH

- 2014, 2015, 2016, 2017

RPJMN

- 2010-2014
- 2015-2017

RKP

(APBN)

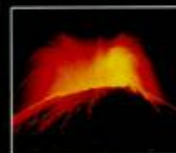
2014, ..., 2017

Proses penyusunan RKP mengikuti UU 25/2004 tentang SPPN



REPUBLIC OF INDONESIA

LIST OF PLANNED GRANT PROJECTS - DRKH 2012 -



Contoh

(US\$'000)

No	Project	Grant	Counterpart Fund	Donor Indication
Kementerian Kehutanan/ Ministry of Forestry				
4	Forest Investment Programme Indonesia (FIP)	37,500	-	Multilateral Development Banks (WB, ADB, IFC)
Kementerian Lingkungan Hidup/ Ministry of Environment				
9	Policy Advice in Environment and Climate Change Phase II	9,170	917	Germany
10	The Implementation of Indonesia Ozone Layer Protection Project	25,000	-	Multilateral Fund (WB, ADB, UNDP) dan GEF

1. **Project Title** : Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA)
2. **Executing Agency** : Ministry of Women Empowerment and Child Protection
3. **Implementing Agency** :
 - a. Ministry of Women Empowerment and Child Protection
 - b. Ministry of Administrative Reform
 - c. Civic Education Center
4. **Duration** : 36 months
5. **Location** : DKI Jakarta

Beberapa K/L
sebagai
implementing
agencies

LSM sebagai salah
satu implementing
agency

6. Background and Justification

Indonesia has had significant political changes in its history, including large scale decentralization. The devolution of power from central government to the province and district has brought changes in regulatory policy and institutional. Thus, a complex environment, along with social, religious and cultural norms that limit the scope of women's movement which it creates challenges for women to participate as actors in the development of a strong democracy.

Although there has been significant progress in the submission of the women's rights in Indonesia, there are still many barriers to their participation in community life. For example, although there are no legal barriers to women's participation in politics they are still significantly under represented. In order to increase their numbers and effectiveness as elected representatives, potential election candidates, informed voters and civil servants – targeted sustained capacity development are required to address political and institutional obstacles.

7. Scope of Work

The scope of work of the activity is divided into 2 (two) periods, namely 2012-2013 and 2014-2015, each period consists of 4 main inter-related components:

a. Period of 2012-2013

1) Component: Civic Education:

- a) Establishment of Women in Politics Unit (WPU) in Civic Education Center (CEC) at Jakarta (University of Indonesia);
- b) Conducting trainings on gender equality to CEC's target group (with emphasis to the women groups, youth and first time voters);
- c) Coordinating Civil Society Organization (CSO) grants to women CSOs in developing civic education;
- d) Facilitating CSOs in developing list of potential women candidate for the national elections 2014 (from CSOs and political parties).

TERIMA KASIH